

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II & III



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, SH, MH**

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Pihak Pertama,




H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 117.923.059.722,-
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	RP. 226.048.835.983,-
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RP. 443.886.400,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 344.415.782.105,-

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Kepala Badan,



[Handwritten signature]

H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

**PENJELASAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja

Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah seluruh aktifitas pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai pada pelaporan.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perda No.1.tahun 2023.tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Opini BPK terhadap LKPD	Kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan berkontribusi terhadap opini BPK.	Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK

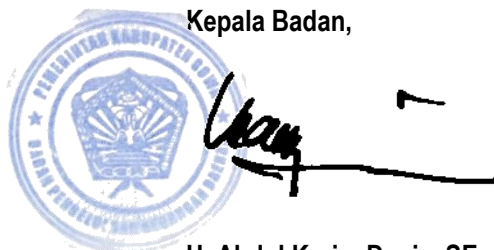
Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Opini BPK menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku .

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Kepala Badan,



H. Abdul Karim Dania, SE., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199603 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl.Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHMUD,S.Sos, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM



MAHMUD,S.Sos, MM

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKERTARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	100%
		Persentase capaian realisasi keuangan	90%
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sesuai ketentuan	4
2	Tersedianya laporan keuangan yang sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun Sesuai ketentuan	1
3	Terlaksananya monitoring kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring	4
4	Tersedianya perangkat kerja pegawai	Persentase perangkat kerja dalam kondisi baik	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.830.000,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 116.581.012.222,-
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 219.000.000,-

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 750.726.000,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 64.911.600,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 82.135.000,-
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 158.444.900,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 117.923.059.722,-

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

Sekretaris,

MAHMUD, S.Sos, MM

**PENJELASAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja

Meningkatnya kinerja sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya hasil kerja urusan sekretariat meliputi administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Indikator Program :				
1	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	Pegawai dengan predikat baik menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah mencapai kinerja sesuai target dan berperilaku baik.	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang predikat baik} \times 100}{\text{Jumlah pegawai yang ada}}$	Subag Kepegawaian
2	Persentase capaian realisasi keuangan	Capaian realisasi keuangan menunjukkan kebersihan pelaksanaan seluruh program yang telah direncanakan	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran} \times 100}{\text{Total pagu}}$	Laporan SPJ BPKD

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	100%	Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 100%. Target ini berusaha dipertahankan dari capaian SKP tahun 2022. Capaian SKP pegawai dengan predikat baik sebesar 100%.
Persentase capaian realisasi keuangan	90%	Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 90%. Target ini ditetapkan lebih besar dari capaian tahun 2022. Capaian realisasi keuangan Tahun 2022 sebesar 88,68.%

**PENGUKURAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKERTARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kinerja sekertiat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase kinerja pegawai dengan predikat baik.	100%	100	100%	Jumlah ASN di BPKD sebanyak 44 orang, berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 44 pegawai berkinerja dalam SKP berkategori baik
		Persentase capaian realisasi keuangan	90 %	$\frac{323.072.260.649}{257.020.679.483} \times 100 = 79,55 \%$	88,38%	Realisasi capaian keuangan tidak mencapai target 100% karena gaji P3K untuk Kab.Gowa penganggarnya ada di BPKD dan realisasi anggaran untuk pembayaran Gaji hanya sebesar 34,28 % karena ada gaji P3K yang sudah dianggarkan namun belum dibayarkan pada tahun 2023 sehingga capaian realisasi keuangan hanya sebesar 88,38 %.
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun Sesuai ketentuan	4	4	100%	Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah RENJA ,RKA pokok dan Perubahan serta Laporan Kinerja
2	Tersedianya laporan keuangan yang sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun Sesuai ketentuan	1	1	100%	Dokumen laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023
3	Terlaksananya monitoring kinerja pegawai	Jumlah laporan hasil monitoring	4	4	100%	Laporan hasil monitoring yang dimaksud adalah laporan monitoring realisasi SKP triwulan

4	Tersedianya perangkat kerja pegawai	Persentase perangkat kerja dalam kondisi baik	100 %	100%	100%	Perangkat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi terdiri dari ATK dan peralatan Komputer lainnya semua dalam kondisi berfungsi dengan baik. Semua perangkat memiliki biaya pemeliharaan sehingga rutin dilakukan perawatan.
---	-------------------------------------	-----------------------------------------------	-------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan

Sekretaris,



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM
Nip : 196412311996031012

MAHMUD, S.Sos, MM
Nip : 197607191998031003



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A.YASSER CIPTA NUR, S.Sos.,MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Pihak Kedua



H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

Pihak Pertama,

A.YASSER CIPTA NUR, S.Sos.,MM

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	persen (%)	100,00
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten	Jumlah orang yang memahami penatausahaan	Orang	80
2.	Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan	Jumlah dokumen penerbitan SP2D	SP2D	7500
3.	Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan	Dokumen	7500

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 299.132.322,-,-
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 299.132.322,-,-
Total Anggaran		Rp. 299.132.322,-,-

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM
Nip : 196412311996031012

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,



A. YASSER CIPTA NUR, S.Sos., MM
Nip : 19760502 199803 1 005

**PENJELASAN PENGUKURAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Yang dimaksud uraian sasaran tersebut adalah semua transaksi keuangan yang diproses **sesuai aturan**, mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan kemudian diusulkan untuk dapat dibayarkan, sehingga menghasilkan Laporan penatausahaan keuangan yang akuntabel.

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten
2. Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan
3. Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan administrasi penatausahaan Keuangan Daerah .

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	Seluruh rangkaian pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mulai dari proses penerbitan SPD sampai pada penerbitan SP2D harus sesuai dengan aturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target dokumen penatausahaan triwulan}} \times 100$	Jumlah Laporan SP2D yang terealisasi
1.	Indikator Kegiatan Jumlah orang yang memahami penatausahaan	Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan pemerintah daerah semakin beradaptasi dengan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat	Jumlah pengelolah keuangan SKPD	Bidang perbendaharaan dan kas daerah
2.	Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen penerbitan SP2D	Proses pencairan anggaran belanja SKPD sesuai aturan perundang-undangan akan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan	Bidang perbendaharaan dan kas daerah

3.	Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan	Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan atas realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan aliran kas diharapkan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Rekon	Berita acara rekon
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	100 %	Persentase realisasi SKPD yang melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan dengan tertib pada triwulan ke IV adalah 55% dari target 40% sehingga capainya sebesar 138%.
Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi	80 orang	Target SDM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kompetensi masih 80 orang seperti tahun sebelumnya yang terdiri dari PPK dan Bendahra pengeluaran 54 SKPD
Indikator Kegiatan : Jumlah penerbitan SP2D	7.500 SP2D	Target penerbitan SP2D untuh tahun 2023 sebanyak 7.500 SP2D karena berdasarkan dari histori capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi sebanyak 7.900 SP2D dari target 7.000 SP2D
Indikator Kegiatan : Jumlah pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan secara berkala	7.500 Dokumen	Target dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan sebanyak 7.500 dokumen karena berdasarkan dari histori capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi sebanyak 7.900 dokumen dari target 7.000 dokumen.

**PENGUKURAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	persen (%)	100%	120%	120%	Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yaitu meliputi seluruh proses pencairan anggaran mulai dari penerbitan SPD, SPM sampai pada penerbitan SP2D
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yang kompeten	Jumlah orang yang memahami penatausahaan keuangan daerah	Orang	80	80	100	ASN yang memahami penatausahaan keuangan daerah sebanyak 80 orang terdiri dari PPK & bendaharan pengeluaran dari 54 SKPD
2.	Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan	Jumlah dokumen penerbitan SP2D	SP2D	7.500	9.010	120	Penerbitan dokumen SP2D dengan capaian sebesar 119% dari target 7500 SP2D
3.	Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan	Dokumen	7.500	9.010	120	Pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan pelaporan yang dilaksanakan pada triwulan s/d triwulan IV capaiannya sebesar 119% dari target 7.500 dokumen

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM
Nip : 196412311996031012

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,

A. YASSER CIPTA NUR, S.Sos., MM
Nip : 19760502 199803 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl.Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF,SE,MM**

Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,




H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM


YUSUF,SE,MM

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	persen (%)	90
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2
2.	Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Dokumen	12
3.	Tersedianya laporan mutasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	Laporan	30

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 443.886.400,00-
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 443.886.400,00,-
Total Anggaran		Rp. 443.886.400,00,-

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Kepala Bidang Aset Daerah,

Kepala Badan



H.ABD. KARIM DANIA,SE,MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199603 1 012

YUSUF,SE.MM
Pangkat: Penata Tk.I
Nip : 19740901 200701 1 016

**PENJELASAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara komprehensif dan profesional dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah
2. Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan
3. Tersediaanya laporan mutasi Barang Milik Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	Dalam hal dalam tertib administrasi menjadi acuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih memadai.	$\frac{\text{Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang diselesaikan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah keseluruhan dokumen penatausahaan barang milik daerah yang di susun}} \times 100 \%$	Dasar Hukum terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, Regulasi, Kebijakan, Standar Harga.
1.	Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen Standar Harga yang disusun oleh perangkat daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan KUA/PPAS	Jumlah dokumen, perencanaan barang milik daerah yang di susun.	Usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
2.	Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Penatausahaan Aset	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun.	Hasil rekonsiliasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3.	Indikator Kegiatan: Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	Percepatan dokumen terkait pemindahtanganan dan penghapusan dari OPD terkait	Jumlah dokumen pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan yang diselesaikan	Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi dari OPD terkait.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	90 %	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib yaitu pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan memastikan bahwa aset daerah digunakan secara optimal dan akuntabel.
Indikator Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Dokumen Standar Harga yang disusun oleh perangkat daerah kedalam peraturan bupati yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RKA dan KUA/PPAS.
Indikator Kegiatan : Jumlah penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	12 Laporan	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah tercapai setelah dilaksanakan rekonsiliasi atas pengandaan barang milik daerah pada pengguna barang.
Indikator Kegiatan : Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	30 Laporan	Percepatan dokumen terkait pemindahatangan dan penghapusan dari OPD disajikan atas pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah baik secara fisik maupun administrasi.

**PENGUKURAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA BIDANG ASET DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah dengan tertib	persen (%)	90	90	100 %	Tata Kelola Barang Milik Daerah meliputi seluruh proses penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan yang telah dilakukan dengan tertib capainya 90% terdiri dari dokumen perencanaan, penatausahaan dan mutasi barang milik daerah.
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100 %	Realisasi dokumen perencanaan Barang milik Dearah 2 dokuemen terdiri dari dokumen hasil rekapitulasi kebutuhan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja.
2.	Tersedianya penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan	Dokumen	12	12	100 %	Realisasi dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah terdiri dari Buku Inventarisasi, KIB dan Penyusutan dari hasil audit BPK RI.
3.	Tersedianya laporan mutasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi Barang Milik Daerah	Laporan	30	53	177 %	Realisasi laporan mutasi Barang Milk Daerah capainya sebesar 177% dari target 30 laporan karena adanya hibah, dan pemindahatangan berupa penjualan Barang Milik Daerah, Pemusnahan dan Penghapusan Aset.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H.ABD. KARIM DANIA, SE, MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199603 1 012

Kepala Bidang Aset Daerah,



YUSUF, SE, MM
Pangkat: Penata Tk I
Nip : 19740901 200701 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Mesjid Raya No.30 Telp.(04118) 865098 Sungguminasa 92111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMIL WIRIADINATA,SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

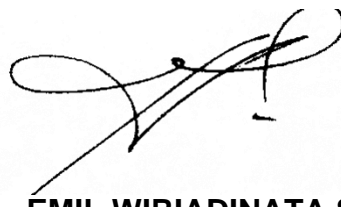
Sungguminasa, 5 Juli 2023

Pihak Kedua




H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

Pihak Pertama,



EMIL WIRIADINATA,SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Persen (%)	100
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Jumlah regulasi yang disusun	dokumen	18
2	Tersediannya dokumen anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah yang diverifikasi	dokumen	222

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 706.784.493,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 706.784.493,-
TOTAL ANGGARAN		Rp. 706.784.493,-

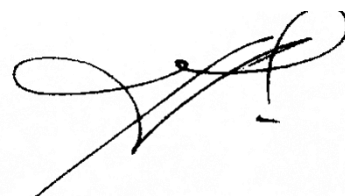
Sungguminasa, 5 Juli 2024

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

Kepala Bidang Anggaran ,



EMIL WIRIADINATA, SE

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Uraian sasaran meningkatnya perencanaan perangkat daerah yaitu disusun berbasis kinerja agar dapat mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur dan atas output yang dapat memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik.

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran
2. Tersedianya dokumen anggaran perangkat daerah.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Indikator Program :				
1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun oleh perangkat daerah aturan perundang-undangan agar pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan yang direncanakan efektif dan efisien serta mendukung program prioritas serta mendukung program prioritas pemerintah daerah/provinsi/nasional	$\frac{\text{Jumlah dok. Perencanaan yang sesuai dengan penganggaran}}{\text{Jumlah Keseluruhan dok.perencanaan dan penganggaran}} \times 100$	Subid penyusunan APBD
2	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Regulasi dan kebijakan anggaran merupakan acuan dalam Menyusun perencanaan dan anggaran perangkat daerah sehingga kualitas perencanaan optimal	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Subid penyusunan APBD
3	Dokumen anggaran perangkat daerah	Dokumen anggaran yang disusun oleh perangkat daerah akan menjadi bahan penetapan dokumen perencanaan anggaran yang meliputi Perda dan Perkada tentang APBD	Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah yang diverifikasi	

		sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam perundang-undangan		Subid penyusunan APBD
<p>Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:</p>				
INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN		
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	100%	Dokumen perencanaan anggaran SKPD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangatlah penting untuk diselesaikan tepat waktu agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi tepat waktu serta pelayanan public terlaksana dengan baik.		
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran	18 dokumen	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran merupakan surat Keputusan kepala daerah ataupun sekretaris daerah tentang perubahan anggaran pada SKPD yang meliputi adanya pergeseran anggaran dalam ruang lingkup SKPD yang bersangkutan		
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	222 dokumen	Dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang meliputi Rencana kerja anggaran (RKA), kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), nota keuangan, Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.		

**PENGUKURAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
KEPALA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	persen (%)	100	100%	100 %	Dokumen perencanaan anggaran SKPD yang dimaksud adalah Dokumen Rencana kerja Anggaran (RKA) Rencana kerja perubahan Anggaran (RKPA). Sementara dokumen penganggaran ialah Dokumen pengguna Anggaran (DPA) Dokumen pengguna perubahan Anggaran (DPPA), Nota Keuangan pokok dan perubahan , prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pokok dan Perubahan kebijakan Umum penganggaran pokok dan perubahan, Peraturan Daerah tentang APBD pokok dan perubahan serta Peraturan Kepala daerah tentang PBD pokok dan perubahan
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA
1.	Terjadinya regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Jumlah regulasi yang disusun	Dokumen	18	20	100	Dokumen regulasi dan kebijakan bidang anggaran merupakan dokumen perubahan anggaran SKPD yang disebabkan oleh adanya perubahan anggaran baik yang diakibatkan oleh adanya perubahan anggaran dan ataupun penambahan anggaran sebelum jadwal penyusunan perubahan APBD dilaksanakan .
2.	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah berdasarkan regulasi.	Jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah yang diverifikasi	Dokumen	222	222	100	Dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah terdiri atas : 53 dokumen RKA, 53 dokumen RKPA, 53 dokumen DPA, 53 dokumen DPPA, 1 dokumen peraturan daerah tentang APBD,1 dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD, 1 dokumen peraturan kepala daerah tentang APBD, 1 dokumen peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD, 1 dokumen Nota keuangan pokok, 1 dokumen Nota keuangan Perubahan, 1 dokumen KUA, 1 dokumen KUPA, 1 dokumen PPAS pokok dan 1 dokumen PPAS perubahan

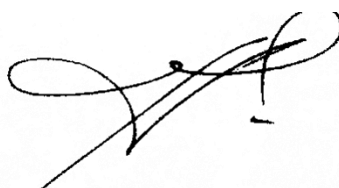
Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H.ABD. KARIM DANIA,SE,MM

Kepala Bidang Anggaran,



EMIL WIRIADINATA,SE



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. (0411) 865098, Sungguminasa 92111

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAMDHANI UTAMY MUCHTAR, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 05 Juli 2023

Pihak Kedua




H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

Pihak Pertama,



RAMDHANI UTAMY MUCHTAR, S.STP, M.Si

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dokumen	1 Dokumen
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya SDM Penyusun LKPD	Jumlah SDM yang mendapatkan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban	Orang	80
2.	Terlaksananya penyusunan LKPD	Jumlah laporan Keuangan SKP yang diverifikasi dan dikonsolidasi	Laporan	54

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
I	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 335.398.600.
1	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 335.398.600.
Total Anggaran		Rp. 335.398.600.

Sungguminasa, 5 Juli 2023

Kepala Badan



[Handwritten signature of H. Abd. Karim Dania]

H. ABD. KARIM DANIA, SE, MM

Kepala Bidang Akuntansi

[Handwritten signature of Ramdhani Utamy Muchtar]

RAMDHANI UTAMY MUCHTAR, S.STP, M.Si

**PENJELASAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu terwujudnya tata kelola yang baik sehingga dapat memberikan berbagai manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Uraian Sasaran Kegiatan :

1. Tersedianya SDM penyusun LKPD
2. Terlaksananya penyusunan LKPD

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja, antara lain:

1. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
I	Indikator Program Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dalam pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan maka pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan	Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 77 Tahun Anggaran 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP No. 71 Tahun 2020 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Bidang Akuntansi
1	Indikator Kegiatan Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban	Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Penyusun Laporan Pertanggungjawaban LKPD berdasarkan jumlah SKPD	Bidang Akuntansi
2	Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan konsolidasikan	Dokumen Laporan Keuangan seluruh SKPD yang diverifikasi dan konsolidasi akan menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP	<u>Laporan Keuangan SKPD</u>	Bidang Akuntansi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Indikator Program Tersusunnya LKPD sesuai SAP	1 Dokumen	Pencapaian target diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Indikator Kegiatan	80 Orang	Jumlah SDM yang dibina dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban dicapai dengan diadakannya pelaksanaan pelatihan maupun bimbingan teknis sebelum penyusunan laporan

<p>Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban</p>		<p>dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas SDM sehingga laporan yang disusun akuntabel, akurat, dan handal.</p>
<p>Indikator Kegiatan</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan dikonsolidasikan</p>	<p>54 Dokumen</p>	<p>Capaian target ketepatan akuntansi pelaporan keuangan daerah yaitu kesesuaian antara dokumen rekonsiliasi dengan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.</p>

PENGUKURAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPD sesuai SAP	Dokumen	1	1	100%	Penyajian laporan Keuangan berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk Laporan PSAP Yang terdiri atas LRA, Neraca, Lap Arus Kas, LP-SAL, LPE, LO dan CaLK Berdasarkan SAP
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN
1.	Tersedianya SDM Penyusun Laporan Keuangan	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban	Orang	80	80	100%	Pembinaan Aklap & Pertanggungjawaban dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis/Pelatihan sebelum penyusunan Laporan Keuangan
2.	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan SKPD yang diverifikasi dan dikonsolidasikan	Laporan	54	54	100%	Verifikasi & Konsolidasi dilaksanakan setelah penyusunan laporan keuangan SKPD melakukan rekonsiliasi penerimaan & pengeluaran untuk selanjutnya menyusun laporan keuangan.

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan



H. ABD. KARIM DANIA,SE, MM

Kepala Bidang Akuntansi



RAMDHANI UTAMY MUCHTAR, S.STP, M.Si